



## Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu

Ozi Rahmat Putra, As'Ad, Elly Revolina

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu, 38115, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: Mei 17, 2023

Revised: July 20, 2022

Available online: September 01, 2023

### KEYWORDS

Scalogram Analysis, Gravity Analysis, Center of Economic Growth, Public Service Facilities, Population

### CORRESPONDENCE

Name: Elly Revolina

E-mail: [yusa.djuyandi@unpad.ac.id](mailto:yusa.djuyandi@unpad.ac.id)

### A B S T R A C T

This research aims to determine which sub-districts that becomes the centers of economic growth in Bengkulu City, and how big is the interaction between the growth of the center sub-district economic and the sub-districts in the surrounding area. This research uses secondary data in 2021 sourced from BPS Bengkulu Province, BPS of Bengkulu city, along with journals and literature related to this research. The data analysis method that is used in this study is Scalogram Analysis by combining the Centrality Index and weighting techniques and Gravity Analysis. Scalogram analysis is used to determine the centers of economic growth in each sub-district based on the availability of public service facilities such as government facilities, economic facilities, and social facilities. Gravity analysis is used to find out how much interaction is between the sub-districts economic growth and the surrounding sub-districts (hinterland) by using the variable of population and the distance between the two regions. Based on the results of the research from the Scalogram Analysis and the centrality index that has been carried out, that the growth center in Bengkulu City is based on 30 service facilities, which is Bengkulu city with the highest total service facilities and centrality index. Based on the results of gravity analysis using population and distance variables of the central district of Central Bengkulu has the strongest interaction with Singaran Pati District as the surrounding area (hinterland).

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan daerahnya, khususnya dengan adanya era otonomi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 (sekarang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 (sekarang diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pengembangan ekonomi daerah ialah suatu proses dimana pemerintah setempat dan warganya bersama-sama mengurus potensi yang melibatkan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Lincoln, 2002).

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan secara keseluruhan adalah pertumbuhan ekonomi (Karismawan, 2020; Djati et al., 2016). Namun, walaupun telah menjadi indikator pembangunan yang umum, pertumbuhan ekonomi masih belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individu (Gulo, 2015). Oleh karena itu, pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan ekonomi (Badri, 2015). Pertumbuhan ini mencakup laju pertumbuhan di berbagai bagian ekonomi secara tidak langsung mencerminkan perubahan ekonomi. Bagi daerah, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan bermanfaat dalam menetapkan orientasi kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk masa depan (Emalia & Farida, 2018; Prok, 2015).

Pentingnya pertumbuhan ekonomi wilayah tidak hanya terfokus pada pertumbuhan sektoral, melainkan juga perlu mempertimbangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat wilayah (Ermawati, 2010). Tujuan utamanya adalah

untuk mencapai pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah, karena pertumbuhan ekonomi wilayah memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (Fadrullah, 2022). Tarigan (2007), menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah harus berasal dari mekanisme internal perekonomian wilayah tersebut, bukan hanya dari bantuan atau suntikan dana dari pemerintah pusat, sehingga pertumbuhan tersebut dapat berkelanjutan meskipun bantuan dihentikan. Teori peningkatan jalur cepat (*turnpike*), yang dibuat oleh Samuelson, menekankan bahwa setiap wilayah perlu mengidentifikasi sektor atau komoditas yang memiliki banyak peluang untuk berkembang (Imelda, 2013; Indira, 2018). Dengan kata lain, dengan sumber daya yang sama, sektor tersebut dapat menghasilkan nilai lebih besar yang signifikan dan mampu berproduksi dalam waktu relatif singkat. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan sektor-sektor lain yang berhubungan dan mendukung dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut (Kumalasari, 2010). Dengan demikian, pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan mendorong kemajuan nasional (Aries et al., 2016; Riyadi & Deddy, 2004).

Tingkat kesuksesan perkembangan suatu wilayah dapat dinilai pada prestasi progres ekonomi yang signifikan dan pengurangan perbedaan pendapatan antara penduduk dan sektor yang semakin terkecil (Sjafrizal, 2018). Suatu perekonomian dapat dianggap mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila aktivitas ekonominya meningkat atau melebihi tingkat pada tahun sebelumnya (Filipus et al., 2019; Tampilang, 2015).

Salah satu dari langkah yang bisa diambil guna mempercepat pertumbuhan suatu wilayah ialah dengan mengembangkan wilayah melalui tempat pusat pertumbuhan. Meskipun terdapat ketergantungan dalam sumber daya

keuangan untuk pelaksanaan pembangunan, tempat pusat pertumbuhan akan membantu pemerintah dalam lebih fokus membangun wilayah tersebut, sehingga wilayah tersebut akan memberikan dampak positif pada daerah sekitarnya. Melalui penetapan pusat pertumbuhan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut (Nainggolan, 2013).

Kota Bengkulu adalah salah satu kota di Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah mencapai 151,70 km<sup>2</sup> dan penduduk 364.604 jiwa (2020) dengan sebaran 2.495 jiwa/km dan memiliki 9 Kecamatan. Kecamatan terbesar ialah kecamatan Selebar dengan luas wilayah 46,35 Km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil ialah kecamatan Teluk Sagara dengan luas wilayah 2,76 Km<sup>2</sup>. Kota Bengkulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 378,60 ribu jiwa. Yang tersebar di 9 kecamatan.

Dalam menetapkan konsep perencanaan wilayah, menetapkan suatu wilayah sebagai kota atau bukan menjadi satu kebijakan yang sangat penting. Penunjukan wilayah ini diharapkan akan mampu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda ketika dibandingkan dengan wilayah pedesaan dan pedalaman. Wilayah perkotaan ini memiliki fasilitas yang lengkap dengan fungsi yang berbeda – beda. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas manusia dan aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari yang sangat beragam. Karena fungsi dan keberadaannya yang berbeda – beda dan karakteristik setiap daerah yang berbeda – beda maka kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan tujuan pembangunan yang berbeda – beda juga. Aktivitas kegiatan dan pola hidup masyarakat pun juga cenderung berbeda, termasuk aktivitas ekonomi.

Begitu juga yang terjadi di Kota Bengkulu, dalam penetapan daerah pusat dari seluruh kecamatan yang ada di kota Bengkulu perlu di perhitungkan dengan baik. Hal ini dikarenakan, kebijakan penentuan daerah pusat sebagai sektor basis dengan daerah sekitar sebagai sektor pendukung diharapkan akan mampu mengembangkan perekonomian secara keseluruhan di Kota Bengkulu. Perkembangan perekonomian akan diprioritaskan pada daerah sektor, sedangkan daerah sekitar berperan sebagai penyokong aktivitas ekonomi daerah pusat. Kolaborasi ini menjadi salah satu kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan mewujudkan pembangunan Nasional. Pemerintah daerah memiliki *privilage* (kuntungan) dalam memanfaatkan potensi sumber daya untuk bisa dikembangkan. Namun, untuk dapat menentukan daerah / desa yang dijadikan pusat ekonomi maka perlu adanya kriteria pengukuran yang tepat yaitu dengan pendekatan indikator makro seperti kepadatan penduduk, PDRB, inflasi, investasi dll.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Francous Perroux yang disebut Pole Croissance atau Pole de Développement. Landasan utama dari gagasan ini ialah bahwa kegiatan ekonomi disatu wilayah cenderung berpusat pada satu titik inti, dan pengaruh ekonomi tersebut akan menurun seiring dengan peningkatan jarak dari titik inti tersebut. Oleh karena itu, titik inti tersebut disebut sebagai pusat pertumbuhan, sedangkan daerah sekitarnya yang masih terpengaruh oleh pusat pertumbuhan disebut sebagai daerah pengaruhnya (Sugiyanto & Sukes, 2010).

## METODE

Penelitian ini dilakukan di semua Kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data penelitian tahun 2021, yang penelitiannya dimulai Januari 2023 sampai dengan Maret 2023. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berarti data yang dikumpulkan dari laporan dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang berarti metode pengumpulan data melalui dokumentasi tertulis seperti arsip dan buku-buku tertentu, pendapat teori atau hukum dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan sebaran geografis di setiap kecamatan yang terdapat dalam wilayah penelitian. Selanjutnya, metode ini akan melibatkan perhitungan kuantitatif guna mendukung analisis yang dilakukan. Agar tercapainya tujuan, penelitian ini menggunakan dua metode analisis data yaitu Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas dan Analisis Interaksi atau Gravitasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas*

Melalui Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, dapat diidentifikasi bahwa kecamatan dengan jumlah fasilitas pelayanan umum dan nilai indeks sentralitas yang tinggi akan menduduki posisi hierarki tertinggi, dan dianggap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah fasilitas pelayanan umum dan nilai indeks sentralitas yang rendah akan berada di peringkat yang lebih rendah dalam hierarki wilayah.

Dalam penelitian ini, digunakan fasilitas yang terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Daerah (kecamatan) yang dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah disekitarnya (hinterland) adalah daerah yang berada pada hirarki I dan II, sedangkan daerah yang berada pada hirarki III, IV, dan V merupakan daerah sekitar dari daerah pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis skalogram yaitu analisis yang hanya menunjukkan dari keberadaan fasilitasnya, dan pengukuran kategori hirarki hanya berdasarkan urutan dari kecamatan yang memiliki kecamatan yang memiliki jenis fasilitas terbanyak hingga kecamatan yang memiliki kecamatan yang paling sedikit yang ada di Kota Bengkulu dikategorikan kedalam kelompok, dari 30 jenis fasilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Skalogram berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Jenis Fasilitas	Orde Hirarki
1	Selebar	29	I
2	Singaran Pati	29	I
3	Gading Cempaka	28	II
4	Muara Bangka Hulu	27	II
5	Ratu Agung	25	III
6	Ratu Samban	25	III
7	Teluk Sagara	25	III
8	Kampung Melayu	24	IV
9	Sungai Serut	18	IV

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari perhitungan analisis skalogram mengidentifikasi penyebaran fasilitas pelayanan diketahui bahwa hirarki berdasarkan ketersediaan jumlah jenis fasilitas terdapat 4 hirarki terbentuk, yaitu:

1. Hirarki I merupakan kelompok kecamatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas tertinggi yaitu Kecamatan Selebar dan kecamatan Singaran Pati memiliki 29 jenis fasilitas dari 30 jenis fasilitas yang tersedia.
2. Hirarki II yaitu Kecamatan Gading dan Muara Bangka Hulu memiliki 27-28 jenis fasilitas dari 30 jenis fasilitas yang tersedia.
3. Hirarki III yaitu Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Teluk Segara memiliki 25 jenis fasilitas dari 30 jenis fasilitas yang tersedia.
4. Hirarki IV yaitu Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Sungai Serut memiliki 18-24 jenis fasilitas dari 30 jenis fasilitas yang tersedia

Penentuan hirarki pusat pertumbuhan tidak hanya ditentukan berdasarkan atas jumlah fasilitas pelayanan umum yang huni oleh suatu wilayah saja akan tetapi dapat diamati berdasarkan keberadaan frekuensinya.

Berdasarkan nilai Sentralitasnya, maka dapat diidentifikasi dari 9 kecamatan yang terdapat di Kota

Bengkulu Singingi terbagi 4 hirarki, adapun pembagiannya berdasarkan atas perhitungan Sturges yaitu:

$$\begin{aligned}
 k &= 1 + 3,3 \log(n) \\
 k &= 1 + 3,3 \log(9) \\
 k &= 1 + 3,3 (0,9542425) \\
 k &= 1 + 3,14900028 \\
 k &= 4,14900028 \\
 k &= 4
 \end{aligned}$$

Setelah diketahui bahwa jumlah hirarki pada kecamatan yang berada di Kota Bengkulu adalah 4, kemudian terlebih dahulu menentukan Interval untuk mengetahui batas hirarki sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{A-B}{K} \\
 I &= \frac{390,64-221,22}{4} \\
 I &= 42,3
 \end{aligned}$$

Maka hasil perhitungan Interval ialah 42,3. Untuk hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas menentukan hirarki wilayah dapat di lihat pada table 5.2 dibawah:

Tabel 2. Hirarki tiap kecamatan di Kota Bengkulu tahun 2021 dengan menggunakan analisis Skalogram dan indeks sentralitas

No	Nama Kecamatan	Hirarki	Batas Hirarki	Total Indeks Sentralitas	Jumlah Unit Fasilitas P.U	Jumlah Jenis Fasilitas P.U	Pusat Pertumbuhan
1	Selebaran			390,64	665	29	
2	Singaran Pati	I	390,64-348,34	368,97	485	29	
3	Gading Cempaka			533,31	507	28	
4	Muara Bangka Hulu			345,64	462	27	
5	Teluk Sagara			338,01	376	25	
6	Ratu Samban	II	348,28-305,93	320,39	540	24	Selebar
7	Kampung Melayu			318,85	307	24	
8	Ratu Agung			310,63	615	25	
		III	305,93-263,585				
9	Sungai Serut	IV	263,58-221,22	221,22	245	18	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 2 tentang analisis skalogram dan Indeks Sentralitas diatas, maka dapat diidentifikasi dari 9 kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu bahwa pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu terdapat di Kecamatan Selebar. Pada hirarki I terdapat 3 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Singaran Pati, dan Gading Cempaka. ini menunjukkan bahwa kecamatan Singaran Pati dan Gading cempaka memiliki potensi sebagai pusat perkembangan dan menjadi pusat pertumbuhan di daerah sekitarnya.

Sedangkan kecamatan yang terletak di Hirarki IV merupakan kecamatan yang memiliki ketersediaan fasilitas pelayanan umum dan nilai sentralitas yang rendah, diantaranya yaitu kecamatan Sungai Serut.

#### Analisis Gravitas

Dalam penelitian ini, analisis gravitasi digunakan untuk mengukur keterkaitan antara dua daerah yang dianggap

memiliki daya tarik dan pengaruh antar keduanya. Dalam ilmu ekonomi regional, hubungan di antara wilayah dapat dijelaskan sebagai hubungan antara pusat pengembangan ekonomi dengan wilayah sekitar (hinterland). Tingginya angka interaksi menandakan adanya hubungan yang erat antara daerah-daerah disekitarnya, dan sebaliknya angka interaksi yang rendah dapat menunjukkan bahwa daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi semakin jauh dari titik pusat pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan. Hal ini selaras dengan teori Perroux dan dapat dibuktikan dalam table ini, yang mana apabila suatu daerah pusat pertumbuhan ekonomi semakin jauh dari daerah hinterland maka nilai interaksi antara kedua daerah tersebut juga akan semakin rendah.

**Tabel 3.** Nilai interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan ekonomi dengan seluruh kecamatan yang berada di kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021

No.	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Jarak (Km)		Interaksi
	Pusat Pertumbuhan/Asal (i)	Tujuan (j)	Asal (Pi)	Tujuan (Pj)	i-j	(i-j)b	(lij)
1	Selebar	Kampung Melayu	82,84	45,38	5,5	30,25	124,274
2	Selebar	Gading Cempaka	82,84	38,72	4,3	18,49	173,476
3	Selebar	Ratu Agung	82,84	50,22	6,9	47,61	87,3813
4	Selebar	Ratu Samban	82,84	21,27	8,4	70,56	24,9718
5	Selebar	Singaran Pati	82,84	41,02	4,6	21,16	160,591
6	Selebar	Teluk Segara	82,84	21,97	11	121	15,0413
7	Selebar	Sungai Serut	82,84	25,31	8	64	32,7606
8	Selebar	Muara Bangka Hulu	82,84	51,87	12	144	29,8397

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan hubungan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan kecamatan di sekitarnya, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan besaran interaksi tertinggi berada di Kecamatan Singaran Pati. Kecamatan Singaran Pati memiliki interaksi dengan Kecamatan Selebar (pusat pertumbuhan) sebesar 160,591. Besarnya interaksi ini dikarenakan jarak antar dua kecamatan tersebut berdekatan yaitu 4,6 km. Sedangkan kecamatan dengan besaran interaksi paling kecil dengan total besaran interaksi 29,8397 berada di interaksi Kecamatan Selebar dengan Kecamatan Muara Bangka Hulu. Jarak antar dua kecamatan tersebut sebesar 12 km. Sehingga hal ini mengakibatkan pergerakan interaksi pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya (*hinterland*) cukup jauh.

Besarnya angka interaksi sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu jumlah penduduk dan jarak yang menghubungkan antara wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah yang berada di sekitarnya (*hinterland*).

Berdasarkan analisis scalogram setiap kecamatan di bagi menjadi 4 orde hirarki yang menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan fasilitasnya yaitu kecamatan Selebar dan memiliki nilai sentralitas tertinggi juga sebesar 390,64. Berdasarkan analisis gravitasi Selebar mempunyai daerah *hinterland* pada kecamatan Singaran Pati. Singaran Pati menjadi daerah *hinterland* dikarenakan jarak terhadap pusat pertumbuhan sangat dekat. Kecamatan- kecamatan yang yang tidak menjadi daerah belakang dari pusat pertumbuhan harus memiliki fasilitas pelayanan yang lengkap dan memadai agar dapat menjadi daerah pusat-pusat pertumbuhan yang baru. Kecamatan Singaran Pati termasuk pada salah satu daerah pengembangan dari pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu. Untuk itu menjadi catatan untuk pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan pelayanan terhadap kecamatan-kecamatan yang masih belum memadai. Karena setiap kecamatan mempunyai potensi daerah yang berbeda-beda, sehingga jika memiliki fasilitas pelayanan dan infrastruktur yang lengkap, maka dapat dijadikan pusat pertumbuhan yang baru dan dapat mempengaruhi daerah belakangnya untuk berkembang dan lebih maju.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari Analisis Skalogram dan indeks sentralitas yang telah dilakukan bahwa pusat pertumbuhan di Kota

Bengkulu berdasarkan 30 fasilitas pelayanan yaitu Selebar dengan total fasilitas pelayanan dan indeks sentralitas tertinggi sehingga dapat di kategorikan sebagai hirarki I. Sedangkan kecamatan dengan jumlah fasilitas pelayanan dan indeks sentralitas yang rendah yaitu Kecamatan Kampung Melayu dan Sungai Serut di kategorikan sebagai hirarki IV.

2. Berdasarkan hasil analisis gravitasi menggunakan variabel penduduk dan jarak dari kecamatan pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya (*hinterland*), terungkap bahwa kecamatan pusat pertumbuhan Selebar memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Singaran Pati sebagai wilayah sekitarnya (*hinterland*).

## REFERENSI

- Aries, R., Juhardi, & Gani, I. (2016). Analisis Struktur Dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(1), 85–107.
- Badri, B. (2015). Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4). <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.18>
- Djati, T. S. S., Tilaar, S., & Sembel, A. (2016). Kajian Pertumbuhan Wilayah Pengembangan Di Kota Ambon (Studi Kasus: Satuan Wilayah Pengembangan II). *Spasial*, 3(3), 126–135.
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100>
- Ermawati. (2010). Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. *University Sebelas Maret*, 1(1), 1–79.
- Fadrullah, M. (2022). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Universitas Islam Riau*, 33(1).
- Filipus, T., Tondobala, L., & Rengkung, M. M. (2019). Analisis Struktur Ruang Berdasarkan Pusat Pelayanan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Spasial*, 6(1), 14–23.
- Gulo, Y. (2015). Growth Center Identification and Its Supporting Area in Nias Regency Regional Development. *Jurnal Widya Seti*, Volume 18(Nomor 1), Pages 37-48. <https://core.ac.uk/download/pdf/304736659.pdf>
- Imelda. (2013). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Daerah

- Hiterland Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 54–66.
- Indira, G. (2018). "Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Pangkep." *Universitas Negeri Makasar*.
- Kumalasari, R. (2010). *Analisis Perekonomian Regional Subwilayah Pulau Madura Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur*. 28. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71907>
- Lincoln, A. (2002). Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah. *Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah*.
- Nainggolan, P. 2013. (2013). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 15–26.
- Prok, K. (2015). Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 1–15.
- Riyadi, 1967, & Deddy Supriady Bratakusumah, 1954. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah : strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah / Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah*.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyanto, & Sukesai. (2010). Penelitian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau. In *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis* (Vol. 1, Issue 2).
- Tampilang, M. (2015). Analisis Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. In *Berkala Ilmiah*.
- Tarigan, R. (2007). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi cetakan ke empat. In *Jakarta: PT. Bumi Aksara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.